

SKRIPSI
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR SAMSAT
KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2021

Diajukan sebagai salah satu syarat
menyelesaikan Srata Satu (S1)



OLEH:

NURHALISAH
NIM. 218110149

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR SAMSAT
KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2021

Disusun dan diajukan oleh :

Nurhalisah
NIM: 218110149

Telah diperiksa dan diajukan untuk diuji dalam sidang skripsi
Pada tanggal 10 Februari 2022

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si)
NIDN : 0815118302



(Salmin, S.Pd., M.Si)
NIDN : 0805037201

Mengetahui

Ketua Program Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR SAMSAT
KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2021

Disusun dan diajukan oleh :

Nurhalisah
NIM: 218110149

Telah diperiksa dan diajukan untuk diuji dalam sidang skripsi
Pada tanggal 10 Februari 2022

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si)
NIDN : 0815118302



(Salmin, S.Pd., M.Si)
NIDN : 0805037201

Mengetahui

Ketua Program Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN. 0822048901

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : Nurhalisah

NIM : 218110149

Alamat : Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

1. Memang benar skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kantor Samsat Kabupaten Bima Tahun 2017-2021” adalah asli karya saya sendiri .
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri. memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya termaksud meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Nurhalisah

NIM: 218110149



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhatisah.....
NIM : 218110149.....
Tempat/Tgl Lahir : Bolo, 26 September 2000.....
Program Studi : Administrasi Publik.....
Fakultas : Fisipol.....
No. Hp : 085.338.887.837.....
Email : lchahmi2609@gmail.com.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Samsat Kabupaten Bima
Tahun 2017 - 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 Maret2022

Penulis



Nurhatisah

NIM. 218110149

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. pt

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalisah.....
 NIM : 218110149.....
 Tempat/Tgl Lahir : Bolo, 26 September 2000.....
 Program Studi : Administrasi Publit.....
 Fakultas : FISIPOL.....
 No. Hp/Email : 085.338.887.537 / lchahwi2609@gmail.com.....
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.....
 Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap
 Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Kabupaten
 Bima Tahun 2017-2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11. Maret2022
 Penulis



Nurhalisah
 NIM. 218110149

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. pf
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“YAKIN USAHA SAMPAI”



PERSEMBAHAN

- Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orangtua saya ayahanda M. Ali Ismail dan Ibunda Asmah Wati yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan semangat motivasi serta dukungan materi untuk perjuanganku yang selalu ada dari saat aku menjejakkan kaki didunia hingga saat aku siap untuk menyongsong indahnya dunia.
- Teman-teman saya Astri Pramasari, Hazizaturrohmi, Amfiacurniawan, Jumadi Lawotan, Orce Kabunggul, saya ucapkan banyak-banyak atas kesediaan kalian untuk membantu saya dalam mengakhiri studi di Universitas dan dukungan kalian selama ini.
- Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Sopan Sopian yang selalu ada menemani, membantu, dan memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi saya di universitas.
- Terimakasih juga kepada senior saya Kakanda Supriadin MJ dan bang Ismawandi yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
- Saudara-saudara seperjuanganku di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Terima kasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini terselesaikan.
- Almamater kebanggaanku tercinta sebagai tanda terima kasihku yang akan selalu aku kenang sepanjang hayatku.

SKRIPSI
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR SAMSAT
KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2021

Pembimbing I Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si, Pembimbing II Bapak
Salmin S.Pd., M.Si, Penulis Nurhalisah

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana di Indonesia dikenal dengan adanya daerah-daerah otonomi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi. Rumusan masalah Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017 hingga 2021. Adapun tujuan Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017 hingga 2021. Manfaat Penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (SI) Administrasi Publik di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Metode Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Metode Analisis Data dengan Pengumpulan data pada analisis model pertama Primer dan sekunder, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini Kontribusi terhadap dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor kepada Kabupaten Bima sebesar 30% setiap triwulannya, dan dari hasil kontribusi tersebut digunakan untuk membangun bangunan infraskruktur. Saran Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTB-UPPD Kabupaten Bima memiliki pengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada.

Kata kunci : Analisi, Kontribusi, Pajak, Kabupaten Bima.

THESIS

MOTOR VEHICLE TAX CONTRIBUTION ANALYSIS ON ORIGINAL
REGIONAL REVENUE OF BIMA REGENCY

ABSTRACT

Consultant I: Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si, Consultant II: Salmin S.Pd.,
M.Si, Researcher: Nurhalisah

Indonesia is a republic with a unitary government. Indonesia is noted for having autonomous areas due to its adoption of the decentralization idea. From 2017 to 2021, the Motor Vehicle Tax Contribution to Regional Original Income will be calculated. The goal is to determine how much the motor vehicle tax contributes to regional income from 2017 to 2021. Benefits of this research as a requirement for obtaining a bachelor's degree (SI) in Public Administration from the University of Muhammadiyah Mataram's Administration Study Program Public Faculty of Social and Political Sciences. Qualitative research methods in data collection Interview, Observation, and Documentation. Methods of Data Analysis with data collection on the analysis of the first primary and secondary models, data reduction, data presentation, conclusion drawing. The findings of this research Bima Regency contributes 30% of its revenue to the motor vehicle tax revenue-sharing fund every quarter. It is used to construct infrastructure buildings as a result of this contribution. Suggestions for the government include tightening sanctions and improving the existing administrative system to maintain and increase motor vehicle tax revenues because motor vehicle tax revenues in UPTB-UPPD Bima Regency have a significant impact on Regional Original Revenue (PAD) in Bima Regency.

Keywords: Analysis, Contribution, Tax, Bima Regency.

MENGESAHKAN
GALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya. sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Kabupaten Bima Tahun 2017-2021” dapat terselesaikan dengan baik. Yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana srata satu (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Perjalanan dalam meraih pengetahuan selama ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dengan nilai yang tak terhingga. Ketekunan dan keseriusan senantiasa diiringi do'a, telah mengantar penulis untuk mendapatkan semestinya, walaupun tidak seutuhnya. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang diperoleh selama ini adalah perjuangan bersama. Dukungan, semangat dan perhatian yang tulus menjadi dasar semangat baru dalam mengiringi perjalanan penulis untuk menyelesaikan pengembaraan dalam dunia pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, tentumasih banyak kekurangan maupun keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I terima kasih banyak telah membantu dan membimbing saya saya hingga proposal ini terselesaikan.
5. Bapak Salmin, S.Pd., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II terima kasih juga telah membimbing saya hingga proposal ini terselesaikan.
6. Yang saya cintai dan hormati, Kedua orangtua saya ayahanda M. Ali Ismail dan Ibunda Asmah Wati yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan semangat motivasi serta dukungan materi untuk perjuanganku yang selalu ada dari saat aku menjejakkan kaki didunia hingga saat aku siap untuk menyongsong indahnya dunia.
7. Teman-teman saya Astri Pramasari, Hazizaturrohmi, Amfiacurniawan, Jumadi Lawotan, Orceh Kabunggul terimakasih telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Sopan Sopian yang ada menemani, membantu, dan memberi semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada senior saya Kakanda Supriadin MJ yang telah

membantu saya dalam penyusunan Skripsi ini.

10. Dan terima kasih juga kepada bang Ismawandi yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Saudara-saudara seperjuanganku di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
12. Almamater kebanggaanku tercinta sebagai tanda terima kasihku yang akan selalu aku kenang sepanjang hayatku.

Mataram, 10 Februari 2022

Nurhalisah

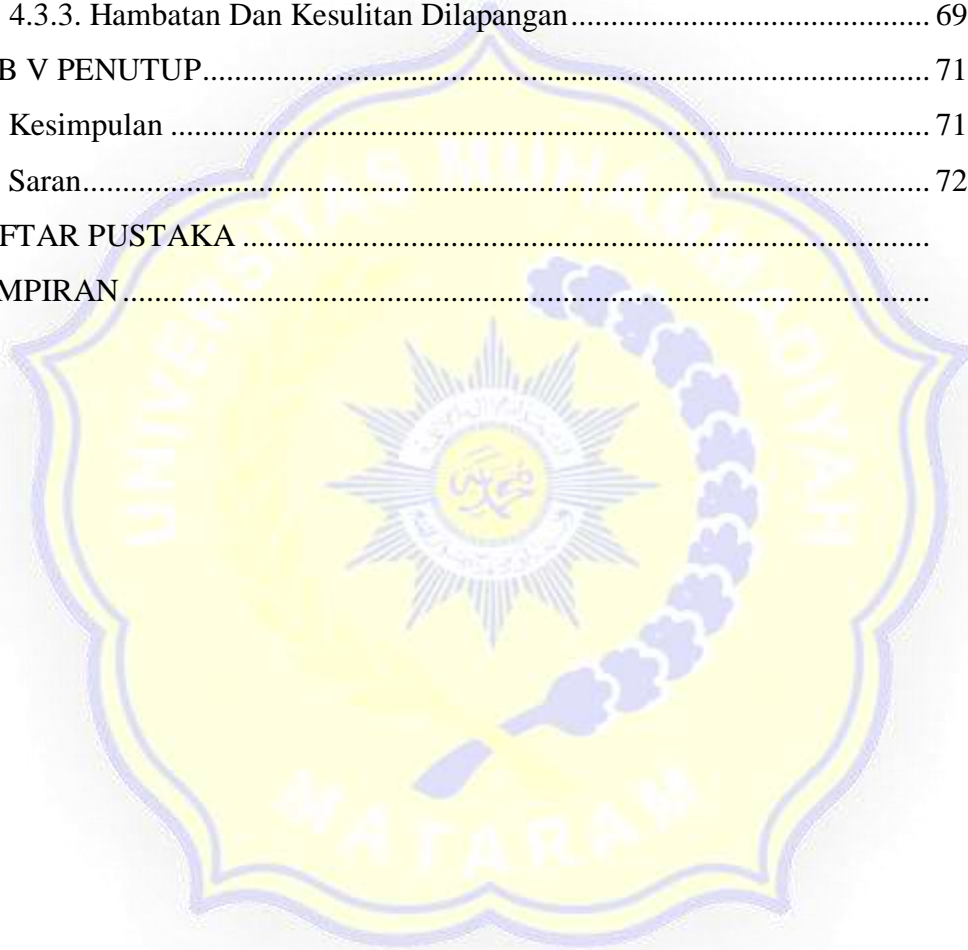


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Tinjauan Teori.....	13
2.2.1. Kebijakan Fiskal	13
2.2.2. Efektivitas	14
a. Pengertian Efektivitas	14
b. Aspek-aspek Efektivitas	15
c. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	16
2.2.3. Pengertian Pajak.....	18
a. Fungsi Pajak.....	21
b. Tujuan Pajak	22
c. Syarat Pemungutan Pajak	22
d. Pengelompokkan Pajak.....	23

2.2.4. Pengertian Pajak Daerah	24
2.2.5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	27
a. Subjek Kendaraan Bermotor.....	28
b. Objek Kendaraan Bermotor.....	29
2.2.6. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
2.2.7. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	31
2.2.8. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	32
2.3. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
3.3. Penentu Informan/ Narasumber	37
3.4. Sumber Data.....	38
3.5. Objek Penelitian.....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6.1. Dokumentasi	39
3.6.2. Wawancara.....	39
3.6.3. Observasi.....	40
3.7. Teknik Analisis Data.....	40
3.7.1. Reduksi Data.....	41
3.7.2. Penyajian Data	41
3.7.3. Kesimpulan Dan Verifikasi.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	43
4.1.1. Gambaran umum Kabupaten Bima.....	43
4.1.2. Sejarah Berdirinya Bappeda Provinsi NTB	47
4.2. Hasil Penelitian	60
4.2.1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD	60
4.2.2. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD	66

4.2.3. Hambatan Dan Kesulitan Dilapangan.....	66
4.3. Pembahasan.....	68
4.3.1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD.....	68
4.3.2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD.....	69
4.3.3. Hambatan Dan Kesulitan Dilapangan.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana di Indonesia dikenal dengan adanya daerah-daerah otonomi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi. Pengertian desentralisasi menurut Bratakusuma dan Riady (2010:7) merupakan “kebijakan pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta mengelola keuangan daerahnya masing-masing.

Di Indonesia, salah satu penerimaan pemerintah yang terpenting merupakan pajak. Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pendapatannya, secara tertentu dan tak tertentu, untuk membiayai pengeluaran saat ini serta pembangunan ekonomi dan nasional suatu masyarakat. Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh orang pada negara tanpa imbalan langsung.

Pemberian otonomi terhadap daerah dimaksudkan agar daerah menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk digunakan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah telah mendorong daerah-daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk

membayai berbagai pengeluaran daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi kekuasaan. Menurut Mustika, 2013 (dalam Rakatitha & Gayatri, 2017) menyatakan bahwa konsekuensi dari pemberian otonomi kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka setiap daerah berhak untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya agar menghasilkan penerimaan bagi daerah, di mana salah satunya adalah mengenakan pungutan berupa pajak kepada masyarakat.

Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (TMbooks, 2013). Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi sendiri ada 5 yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan pendapatan daerah yang besar adalah dari pajak kendaraan bermotor. Besar kecilnya pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya terutama dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah dalam kaitannya dengan biaya dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Pajak artinya iuran pada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan menggunakan tidak mendapat prestasi kembali, yang pribadi bisa ditunjuk dan gunanya buat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berafiliasi dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penghasilan pajak wilayah dari berasal banyak sekali asal, salah satunya yaitu seperti Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Pajak tunggangan bermotor berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi serta dipungut oleh pemda atas kepemilikan atau dominasi tunggangan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan

bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Zulkifli, 2013 (dalam Rakatitha, 2017) menyatakan bahwa terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi.

kantor Samsat pula adalah salah satu instansi pemerintah yang secara eksklusif menyampaikan pelayanan administrasi pada harus Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak tunggangan Bermotor (PKB). Pelayanan yang dilaksanakan di kantor Samsat Kabupaten Bima, yaitu seperti penerbitan Surat indikasi angka tunggangan (STNK) yang berkaitan menggunakan pemasukan uang ke kas negara, diantaranya melalui Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea kembali Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan harus Dana Kecelakaan kemudian Lintas Jalan (SWDKLLJ). keberadaan tempat kerja Dinas Samsat Kabupaten Bima waktu ini adalah keliru satu bukti pemerintah pada memenuhi tanggungjawabnya dalam meningkatkan kemauan rakyat untuk membayar

pajak tunggangan mereka. Sistem administrasi Dinas Samsat suatu sistem administrasi yang dibentuk buat memperlancar serta mempercepat pelayanan pembayaran pajak buat rakyat, yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung/tempat. Dinas Samsat artinya suatu sistem kolaborasi secara terpadu antara Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, serta PT. Jasa Raharja (Persero).

Kantor Samsat Kabupaten Bima akan dijadikan fokus bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dimana Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat. Kabupaten Bima juga memiliki masyarakat dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi di masyarakat, dan semakin berkembangnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bima, mengakibatkan meningkatnya perekonomian masyarakat.

Sebagai daerah yang memiliki aktivitas yang beragam, maka potensi daerah yang khususnya pajak daerah dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima itu sendiri.

Berikut adalah data perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bima Tahun 2016 sampai tahun 2018.

Tabel 1.1.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	108.391236.949	110.097.232.349	101.55

2018	120.447.644.671	188.203.814.216	156.25
2019	195.312.168.175	120.342.972.757	61.61
Rata-Rata			85.70

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Kabupaten Bima tahun 2016-2018 memiliki nilai tahun 2016 sebesar 101.55%; tahun 2017 sebesar 156,25%, dan tahun 2018 sebesar 61,61%. Berdasarkan perkembangan target dan realisasi rata-rata sebesar 85.70% dari tahun 2016-2018. Setiap tahunnya mengalami perkembangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Seberapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bima
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bima?
3. Apa saja hambatan dan kesulitan di lapangan dalam proses pengutipan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bima.
2. Untuk Mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kabupaten Bima.
3. Untuk Mengetahui apa saja hambatan dan kesulitan di lapangan dalam proses pengutipan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bima

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi :

1. Bagi Dinas Samsat Kabupaten Bima

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan pendapatan pajak daerahnya.

2. Bagi Universitas

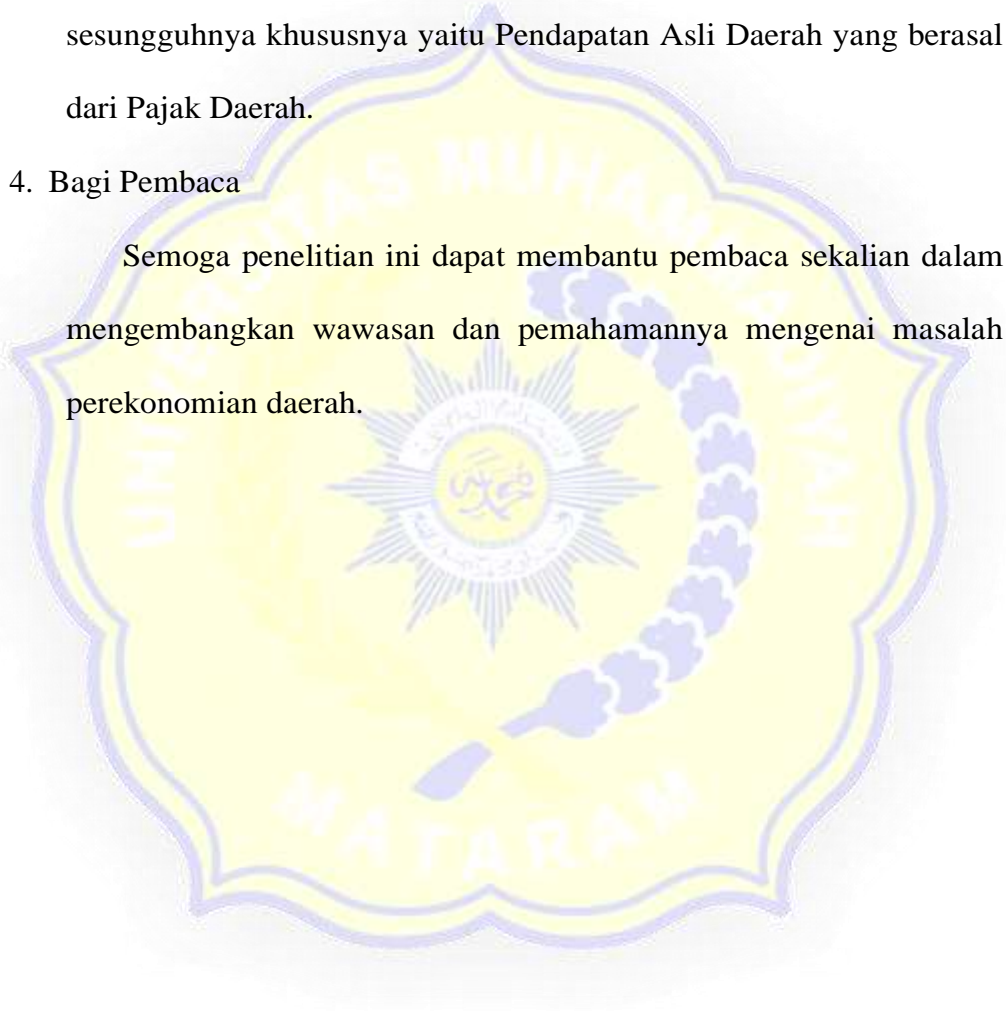
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi di universitas, khususnya bagi para mahasiswa atau pembaca lainnya yang memerlukan informasi informasi tertentu dalam hubungan dengan masalah yang berkaitan dengan pajak daerah.

3. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah kedalam objek yang sesungguhnya khususnya yaitu Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah.

4. Bagi Pembaca

Semoga penelitian ini dapat membantu pembaca sekalian dalam mengembangkan wawasan dan pemahamannya mengenai masalah perekonomian daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

untuk meningkatkan pengetahuan dan menghindari asumsi yang serupa dengan penelitian ini, perlu adanya penelitian terdahulu yang mampu mengidentifikasi fenomena yang sama dalam studi pendahuluan dan pendukung penelitian yang dilakukan yakni pada tabel dibawah ini:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dede Indra (2015)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Nagan Raya.</i>	Kualitatif	Kesimpulan dari penelitian menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah terendah padatahun 2012 sebesar 1,69% termasuk dalam kategori sangat kurang atau rendah.	Yang menjadikan persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang yang saya teliti adalah menggunakan metode kualitatif	Perbedaan nya yang dapat saya pelajari pada peneliti sebelumnya yaitu meneliti tentang analisis factor pajak itu sendiri sedangkan saya analisis kontribusi pajak
2	Natalia (2015)	<i>Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor</i>	Kualitatif	Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak	Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama menganalisa	Perbedaan disini penelitian sekarang dan sebelumnya

		<i>Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi) "</i>		kendaraan bermotor pada Samsat Airmadidi untuk kendaraan bermotor di PAD menunjukkan tren yang meningkat.	kontribusi pajak motor	a terletak titik lokasi yang berbeda
3	Nurul (2016)	<i>Analisis Pengaruh dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efisien dengan persentase rata-rata 10,8%. Dan sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor tergolong moderat.	Persamaan dalam cara memperoleh data yaitu metode kualitatif	Perbedaannya saya dalam meneliti titik focus pada analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor sedangkan peneliti sebelumnya analisis efektifitasnya.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Wayan Sudirman, 2011: 2).

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Amiruddin, 2018: 152).

Menurut beberapa ahli seperti Zain, kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah serta penerimaan yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang di tingkat provinsi lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2.2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Bungkaes, Posumah, dan Kiyai (2013:46) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

1. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan,
2. Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Menurut Susanto (2005:156), efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut Mahmudi (2015:86).

efektivitas merupakan hubungan antara output dengan

tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

b. Aspek- aspek Efektifitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13) efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsung nya proses

kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh pesertadidik.

c. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Gie (2001:29), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:

1. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktorutama, semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal inia kan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.
2. Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka.
3. Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik, demikian pula sebaliknya.

4. Motivasi, pimpinan dapat mendorong bawahannya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.
5. Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dalam informasi kepada bawahannya, harus melaksanakan dengan baik atau tidak.
6. Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terpantau hal ini dapat memperkecil resiko dalam pelaksanaan tugas.
7. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang pegawai dalam bekerja.
8. Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya proses efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga kegiatan dapat berjalan relatif singkat. suatu pelaksanaan kerja tersebut diproses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam

defenisi efektivitas itu sendiri.

2.2.3. Pengertian pajak

Menurut PJA Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2) Pajak adalah iuran umum kepada negara (dikenakan) yang wajib dibayar oleh mereka yang wajib membayarnya menurut aturan umum (undang-undang) tanpa mengembalikan keefektifannya diangkat secara langsung dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan amanat negara dalam menjalankan pemerintahan.

dari Buztamar Ayza (2017), pajak merupakan buah dari pemerintah yang diperoleh melalui adat-norma awam, dikenakan tanpa sejarah yang terbukti bertentangan menggunakan tujuan individu buat membiayai pengeluaran publik.

Pernyataan lain menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara dari warga berdasarkan undang-undang yang sah dan berutang, harus dibayar tanpa penarikan eksklusif hasilnya, hasilnya digunakan buat membiayai pengeluaran negara dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Puspita Dewi 2016).

Pajak artinya iuran yang dilakukan oleh rakyat pada kas negara atas dasar yang halal (berlaku) tanpa imbalan yang dapat ditunjukkan secara eksklusif (timbang pulang) serta digunakan buat membayar porto-porto. Soemitro dalam Mardiasmo (2009: 1).

menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) Pajak artinya iuran warga kepada kas Negara sesuai Undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tiada menerima jasa timbal (kontra Prestasi) yang eksklusif bisa ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran awam dari M.J.H. Smeeths (2015: 3) juga menyebutkan konsep pajak sebagai akibat pemerintah yang dicapai melalui peraturan serta dapat diterapkan tanpa adanya inefisiensi di individu. Ini untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negara.

Pajak ialah kewajiban buat menyetorkan sebagian kekayaan ke kas negara sebagai akibat keadaan, peristiwa atau perbuatan eksklusif, namun bukan menjadi eksekusi, sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dapat dipaksakan, tetapi tanpa adanya timbal balik pribadi. pelayanan publik, buat menjaga kesejahteraan awam (Octovido, Sudjana dan Azizah, 2014).

a. Fungsi Pajak

Bagaimana dapat diketahui dari lampiran definisi pajak berasal definisi yang berbeda, bisa diketahui bahwa ada dua fungsi yaitu:

1. Fungsi pemerintahan (Badgetair)

Pajak berfungsi menjadi asal dana bagi pemerintah buat membiayai pengeluaran publik. misalnya, dalam APBN, pajak

adalah asal nasional.

2. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi buat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi. contohnya PPnBM buat minuman keras dan barang glamor.

b. Tujuan Pajak

Secara awam tujuan yang dapat dicapai berasal diberlakukannya pajak ialah buat mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yang antara lain yaitu:

1. untuk membatasi konsumsi serta menggunakan demikian mentransfer asal dari konsumsi ke investasi.
2. buat mendorong tabungan serta menanam kapital.

c. kondisi pemungutan pajak

pada pembayaran pajak supaya tidak mengakibatkan kendala maka wajib memenuhi beberapa kondisi menjadi berikut (Brotodiharjo, pada Maulana 2013:24):

1. Pemungutan pajak wajib adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak wajib sesuai Undang-undang (kondisi yuridis)
3. tidak Mengganggu perekonomian (syarat irit)
4. Pemungutan pajak wajib efisien (kondisi finansial)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

d. Pengelompokkan pajak

1. menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
 - a. Pajak pribadi yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak tidak pribadi yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.
2. berdasarkan sifat pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri harus pajak.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal di objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri harus pajak.
3. menurut forum pemungut pajak terbagi sebagai dua yaitu:
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut sang pemerintah sentra serta dipergunakan buat membiayai tempat tinggal tangga negara.
 - b. Pajak wilayah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah serta digunakan buat membiayai tempat tinggal

tangga wilayah.

2.2.4. Pengertian Pajak wilayah

dari Ahmad Yani (2002:45) Pajak daerah ialah iuran harus yang dilakukan oleh orang eksklusif atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan buat membiayai penyelenggaraan pemda serta pembangunan wilayah. menurut UU nomor 28 Tahun 2009, pajak wilayah merupakan kontribusi wajib pada wilayah yang terutang oleh orang langsung atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara pribadi dan dipergunakan buat keperluan wilayah sebanyak-besarnya kemakmuran warga . Pajak wilayah terbagi sebagai 2 bagian yaitu pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak wilayah dan retribusi wilayah ialah salah satu bentuk peran serta warga dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah serta retribusi daerah artinya sumber pendapatan daerah yang penting buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah. Pajak wilayah merupakan pajak yang dibayarkan perseorangan atau badan kepada wilayah yang bersifat memaksa. Pajak yang diberikan penduduk kepada daerah digunakan buat kepentingan pemda dalam pembangunan daerahnya contohnya antara lain:

- a. Pembangunan jalan
- b. Pembangunan jembatan
- c. Pembukaan lapangan pekerjaan yang baru
- d. training kerja dan kepentingan pembangunan lainnya.

Pajak daerah pula salah satu asal dalam memperoleh atau menerima (Pendapatan orisinal daerah) disuatu wilayah atau wilayah tadi.

Kriteria pajak wilayah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota yaitu:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Bersifat wajib sehingga akan ada sanksi bagi pelanggar, serta bukan retribusi merupakan tidak dapat dipaksakan dengan sifat ekonomis kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau ijin yang dari pemerintah

- b. Subyek serta dasar penghitungan pajak tak bertentangan menggunakan kepentingan umum
- c. Objek pajak bukan objek pajak provinsi, objek pajak sentra
- d. Potensi cukup
- e. tidak ada dampak negatif terhadap perekonomian
- f. Memperhatikan aspek keadilan serta kapasitas warga

g. Menjaga kelestarian lingkungan.

h. Jenis Pajak daerah

1. Jenis pajak provinsi terdiri berasal:

- a. Pajak kendaraan Bermotor serta kendaraan Diatas Air
- b. Bea balik Nama kendaraan Bermotor serta tunggangan Diatas Air
- c. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Air permukaan

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri dari

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2.2.5. Pengertian Pajak kendaraan Bermotor

Pajak tunggangan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas pemilikan atau penguasaan tunggangan bermotor, berupa dua tunggangan atau lebih dan gandengannya yang dipergunakan pada

seluruh jenis jalan serta dikemudikan sang kendaraan bermotor. alat yang berfungsi mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga buat gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk mesin-mesin olah motilitas yang akbar. Pasal 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengertian Pajak kendaraan Bermotor mengatur bahwa Pajak kendaraan Bermotor (PKB) artinya pajak yang dipungut atas pemilikan dan dominasi tunggangan bermotor serta gandengannya atas semua jenis jalan.

Samudra (2015: 9) menyatakan bahwa “Subjek Pajak kendaraan Bermotor adalah pemilikan atau penguasaan tunggangan bermotor, tidak termasuk pemilikan atau dominasi kendaraan bermotor”. Beban berat seperti bulldoser, ekskavator, ekskavator serta sejenisnya tidak boleh dipergunakan sebagai alat angkut orang atau barang di jalan awam.

a. Subjek pajak kendaraan bermotor

menurut Undang-Undang angka 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi wilayah (Pasal 4 ayat 1), subjek pajak tunggangan bermotor adalah badan aturan yang mempunyai atau mengoperasikan kendaraan bermotor.

dari perda Provinsi Sulawesi Selatan angka 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah di Pasal lima Ayat 1 disebutkan bahwa (Subyek PKB artinya orang eksklusif atau badan yang memiliki

dan /atau mengoperasikan kendaraan bermotor)..

b. Objek Pajak kendaraan Bermotor

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 ihwal Pajak daerah dan Pembayaran Pajak daerah, Pasal 3 Ayat 1, “pokok Pajak tunggangan Bermotor ialah hak untuk memiliki serta mengoperasikan tunggangan bermotor”.

2.2.6. Dasar aturan Pemungutan Pajak tunggangan Bermotor

Dasar hukum pengenaan pajak tunggangan Bermotor (PKB) didasarkan pada ketentuan Undang-Undang angka 28 Tahun 2009, Pasal tiga sampai menggunakan Pasal 8, sesuai ketentuan Undang-Undang PDRB. Penerapan perjanjian bersama intinya tidak berlaku buat seluruh provinsi di Indonesia. Ini artinya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak kepada provinsi. sebab dapat dipungut pada dalam provinsi, maka Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang penerapan penerapan dan teknik pemungutan pajak tunggangan bermotor (PKB) di provinsi yang bersangkutan.

Dasar hukum pemungutan pajak pada Indonesia diatur oleh Pasal 23 A Undang-Undang UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa buat kepentingan

negara diatur dengan undang-undang”.

Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan terkait perpajakan mengalami perubahan yang relatif signifikan. Hal ini bisa dipandang di bagian 23A. 9e6815798cbf5360fb1d222bb47f22fc Negara Republik Indonesia Tahun 19 lima (Undang-Undang Dasar NRI 19 5) mengatur bahwa “Pajak dan retribusi yang bersifat harus untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang”.

Tarif pajak PKB berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, pasal 6 ayat 1 ditetapkan menjadi berikut:

- a. untuk pemilik kendaraan bermotor pertama kali minimal 1% (satu %) dan aporisma 2% (2 %).
- b. buat kepemilikan tunggangan bermotor kedua, dll, tarif bisa ditetapkan secara bertahap minimal dua% dan maksimal 10%
- c. Pajak progresif atas kepemilikan kedua, dll. diperuntukan bagi kendaraan dengan kurang berasal 4 (empat) kendaraan roda 4 atau lebih.
- d. Kepemilikan kendaraan bermotor atas nama dan /atau alamat yang sama.

2.2.7. Pengertian Pendapatan orisinil daerah

Indeks keberhasilan pembangunan daerah tercermin asal pendapatan utama wilayah pada pembiayaan pembangunan wilayah.

Potensi dana pembangunan terbesar serta berkelanjutan dari masyarakat yang dimobilisasi dari pajak dan pendapatan daerah. Peningkatan peran atau proporsi PAD serta APBD tanpa membebani warga serta investor ialah indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah pada mencapai otonomi wilayah, yang lebih penting artinya bagaimana pemerintah mengelola keuangan daerah secara efisien serta efektif (Susilawati serta Riharjo, 2014).

Pendapatan orisinil wilayah adalah komponen penting asal pendapatan orisinil wilayah sebab ialah bagian dari asal pendapatan wilayah selain menerima pembayaran transfer serta pendapatan lain yang sah. semua dibiayai sang pemda (Sri Artini, 2017).

Penerimaan utama daerah merupakan penerimaan wilayah asal industri pajak wilayah, pajak daerah, yang akan terjadi pengelolaan barang milik daerah tersendiri, yang akan terjadi perjuangan daerah, serta pendapatan lain yang halal (Pranaditya, 2017)

Undang-undang angka 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan antara pemerintah sentra dan wilayah secara tegas menyatakan bahwa sumber pendapatan wilayah artinya pendapatan pajak daerah, pajak wilayah, pendapatan perusahaan wilayah, yang akan terjadi pengelolaan wilayah tersendiri, dan pendapatan lain yang legal. luas permukaan, pendapatan, penjualan permukaan artinya semua hak zonasi yang diakui selain nilai aset bersih buat tahun kitab yang bersangkutan. Pendapatan pokok suatu wilayah adalah total

pendapatan yang diperoleh suatu wilayah berasal sumber-sumber yang berada di dalam daerahnya, yang dipungut sesuai perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hikmah, 2017).

2.2.8. sumber Pendapatan orisinil daerah

sumber pendapatan daerah dibagi sebagai 3 jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan orisinil daerah sendiri, yaitu berupa:

1. akibat pajak wilayah
2. yang akan terjadi retribusi wilayah
3. yang akan terjadi perusahaan wilayah
4. Lain-lain yang akan terjadi usaha wilayah yang sah.

b. Pendapatan yang berasal asal hadiah pemerintah pusat, yakni berupa

1. Sumbangan-sumbangan pemerintah pusat
2. Sumbanga-sumbangan lain, yang diatur secara perundang-undangan

c. Lain-lain pendapatan yang legal

Secara aturan, pajak negara bagian bisa dipungut di daerah tersebut. Demikian pula pertimbangan keuangan antara pemerintah sentra serta daerah diatur menggunakan undang-undang. Peraturan pokok yang berkaitan menggunakan pajak serta retribusi pada

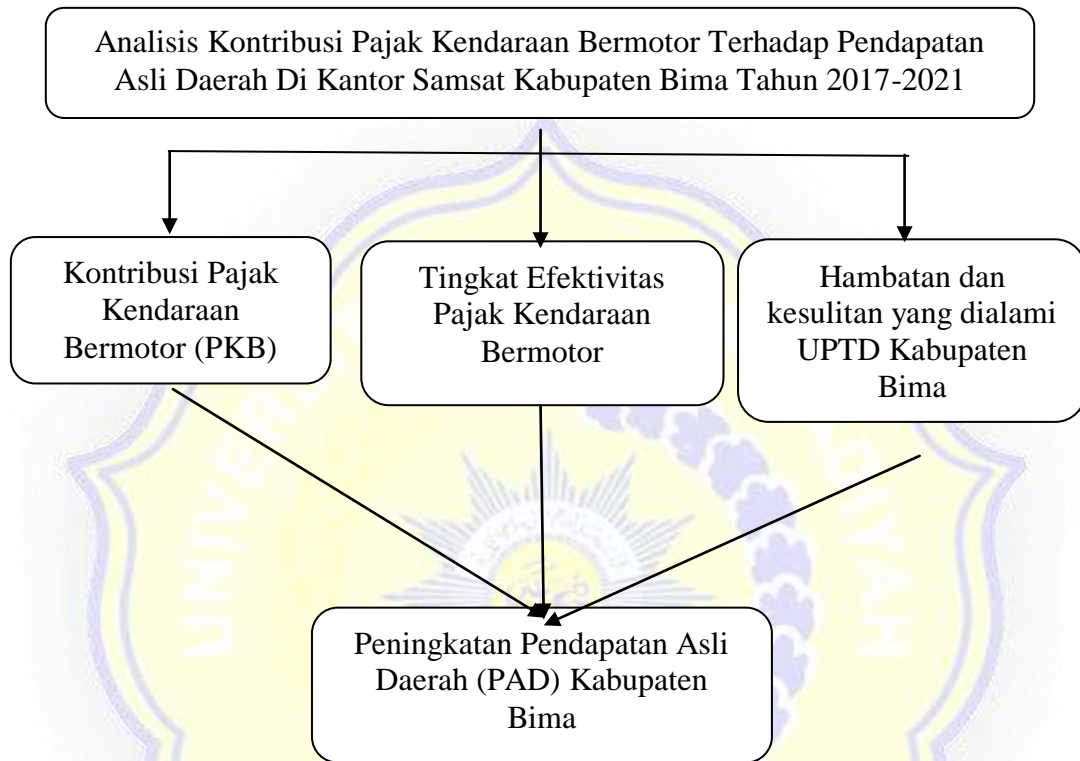
wilayah diatur menggunakan undang-undang. ad interim itu, pajak serta retribusi daerah ditetapkan dengan perda. Demikian pula pengembalian atau pembebasan pajak wilayah serta/atau wilayah pula dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pemda dapat menciptakan usaha-usaha wilayah yang pembinaan dan pengawasannya didasarkan atas asas-asas ekonomi perjuangan. Sedangkan syarat dasar rakyat wilayah diatur menggunakan undang-undang. Penyediaan kontraktor menjadi sumber pendapatan daerah diatur menggunakan perda. Peraturan Daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan berasal pejabat yang berwenang.

menggunakan persetujuan DPRD, pengelola daerah bisa mengambil keputusan pinjam meminjam buat suku bunga serta porto daerah. Keputusan kepala wilayah pula menentukan asal pembayaran bunga serta pencairan pinjaman dan cara pembayarannya. Keputusan ketua wilayah mulai berlaku sehabis mendapat persetujuan Menteri pada Negeri.

2.3. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2
Kerangka berpikir



Penelitian ini dilakukan atas dasar rencana yang telah disusun sebelum proses penelitian dimulai. Secara umum skema seperti tersebut di atas merupakan kerangka penelitian. Uma Sekaran, 1992 (dalam Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka kerja yang baik secara teoritis akan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Karena itu, dalam penyusunan suatu model penelitian harus didasarkan pada kerangka refleksi (Sugiyono, 2017).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan wawasan tentang subjek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan karena adanya masalah yang dihadapi. Penelitian ini diawali dengan melihat data yang diperoleh melalui literatur khususnya berupa laporan pelaksanaan Pendapatan Pokok Menurut Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Daerah Kabupaten Bima yang beralamat di Panda, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima NTB.

3.3. Waktu Penelitian

Adapun waktu dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 dengan alokasi sebagai berikut.

Tabel 3.1
Target dan pelaksanaan penelitian

No	Uraian Kegiatan	Akhir Desember 2021- Januari 2022								
		Bulan	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Di Ajukan Judul Proposal Skripsi									
2.	Mulai Penyusunan Proposal									
3.	Seminar Proposal									

4.	Revisi Proposal								
5.	Melakukan Penelitian								
6.	Mulai penyusunan Skripsi								
7.	Sidang Skripsi								
8.	Revisian Skripsi								
9.	Yudisium								
10.	Wisuda								

3.4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memahami pertanyaan ketika diwawancarai atau hal yang di kaji dan memberi jawaban yang relevan dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari kerangka berpikir peneliti. pada penelitian ini dalam Teknik informan dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling.

Tabel 3.2
Data Narasumber Atau Informan

No	Narasumber	Jumlah
1.	Kasubag Tata Usaha UPTB-UPPD Kab. Bima	1 orang
2.	Staf Samsat Kab. Bima	1 orang
3.	Masyarakat pemilik kendaraan bermotor	1 orang
Jumlah		3 orang

3.5. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder

1. Data Primer

Pada saat melakukan penelitian, peneliti disambut dengan baik oleh para staf kantor dan di arahkan ke ruangan Kasubag Tata Usaha, dan disaat peneliti ingin melakukan wawancara dengan salah satu pengurus UPTB-UPPD kabupaten Bima, peneliti diterima dengan baik oleh pengurus UPTB-UPPD Kabupaten Bima dan langsung melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Pengurus samsat Kabupaten Bima dengan mudah memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, dan ada kendala dalam pencarian data tersebut, tetapi pengurus samsat Kabupaten Bima mengusahakan mencari dan mengumpulkan data agar peneliti tidak kesusahan dalam menyusun skripsinya.

3.6. Objek Penelitian

Untuk pengetahuan penelitian ini, itu adalah bidang pajak. Subyek penelitian ini adalah Laporan Pencapaian Pendapatan Daerah yang diadministrasikan langsung oleh Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (BAPEDDA) Kabupaten Bima dan sumber dari laporan keuangan tahun 2017-2021.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah wahana buat memperoleh data yang

seksama dan bertanggung jawab. Data yang akan dipergunakan peneliti merupakan data sekunder yang diperoleh asal Badan Pendapatan wilayah Kabupaten Bima. Data sekunder artinya data yang dikumpulkan dari banyak sekali sentra data yang terdapat, termasuk pusat data perusahaan, penelitian dan organisasi yang seperti dengan sentra data.

Data yang diperoleh pada penelitian ini memakai dua metode pengumpulan data, yaitu:

3.7.1. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik yang melibatkan pengumpulan data ihwal subjek yang sedang dipelajari. dalam penelitian ini subjek yang diteliti ialah kantor Samsat wilayah Kabupaten Bima.

3.7.2. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang buat bertukar isu dan pandangan baru melalui tanya jawab sebagai akibatnya dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tartentu (sugiyono, 2019: 317). dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan kepala samsat Kabupaten Bima, dimana bisa mengumpulkan data yang menguatkan penelitian tersebut.

3.7.3. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melibatkan suatu indra (penglihatan, pendengaran, penciuman,

pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus di kumpulkan dalam penedlitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah analisis data yang telah dikumpulkan dan dikumpulkan. Melalui analisis data, kita bisa mendapatkan gambaran keseluruhan dari data yang telah kita kumpulkan. (Boedijoewono, 2007). Analisis data adalah tahapan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul dikelola untuk diolah dalam kerangka yang ada. Proses pengelolaan dan pengolahan data ini disebut analisis data.

Dalam analisis data kualitatif Hiles dan Huberman terdapat reduksi data atau reduksi data. Tahap minimisasi data terdiri dari penyederhanaan data agar sesuai dengan kebutuhan dan tentunya informasi mudah diperoleh. Data diperoleh dari wawancara, observasi lapangan langsung, dll. Tentu saja ada bentuk yang kompleks. Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan rumus boedijoewono, 2001 (dalam Rizal dan Hidayah, 2018). Analisis menurut Matthew dan Michael dibagi menjadi tiga aliran operasi yang

dibagi secara bersamaan. Tiga baris yang dimaksud adalah:

3.8.1. Reduksi data

Minimisasi data didefinisikan sebagai proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan. Minimisasi data adalah bagian dari analisis yang menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak perlu, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

3.8.2. Penyajian data

Presentasi yang dirujuk oleh Matthew dan Michael adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

3.8.3. Menarik kesimpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, penelitian mulai mencari makna objek, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi kausalitas, dan proposisi. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran koleksi catatan, metode enkripsi, penyimpanan dan pengambilan yang digunakan, keterampilan peneliti, dan persyaratan donor. Kesimpulan hanya bagian dari operasi dari konfigurasi lengkap. Pembuktian atau verifikasi dapat dilakukan untuk meminta pembenaran dan persetujuan, sehingga efek dapat dicapai.